



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JULMANSYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 521764

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.965.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
3. Tanah Seluas 35000 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
6. Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 2625 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 6000 m2/54 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **140.500.000**



1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2/SPD MTR SL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR / SPD MTR SL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOTOYA KIJANG INNOVA G / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, NMAX, 2021 SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.829.050
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.194.329.050
III. HUTANG	Rp.	159.382.540
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.034.946.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.